KR-Antara/Hendra Nurdiyansyah

***RUMAH DI LAHAN KAI:** Warga mengemasi barang miliknya saat pembongkaran rumah di samping Stasiun Yogyakarta, Selasa (1/10/2024). PT KAI Daop 6 Yogyakarta memberikan tenggang waktu proses pembongkaran 75 rumah yang berada di lahan milik PT KAI di Bong Suwung, Gedongtengen, Yogyakarta hingga Rabu (2/10/2024).*

LEMKAPI MINTA TINDAK TEGAS PEMBUBARAN PAKSA DISKUSI

# Polisi Periksa CCTV dan Saksi Kunci

**JAKARTA (KR)** - Polda Metro Jaya telah menyita dan memeriksa sejumlah barang bukti Digital Video Recorder (DVR), yaitu alat untuk memonitor dan merekam objek gambar di kamera pengawas (CCTV) pada kasus pembubaran diskusi di Kemang Jakarta Selatan, Sabtu (28/9). Penyidik juga telah memeriksa saksi kunci kasus tersebut.

"Penyidik telah menyita tiga barang bukti DVR dari CCTV yang ada di TKP, kemudian setelah dilakukan pengecekan awal oleh tim penyidik, maka tergambar di situ peristiwanya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Selasa (1/10).

Penyidik dapat mengidentifikasi dugaan para pelakunya dan para pelakunya saat ini sedang dikejar dan diburu oleh tim penyidik dari Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Subdit Jatanras) serta Subdirektorat Reserse Mobile (Subdit Resmob) Polda Metro Jaya. "Kemudian penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap satu saksi kunci. Saudara JW ini merupakan bagian dari kelompok pelaku yang mengetahui juga peristiwanya," kata Ade Ary.

Selain itu, berdasarkan hasil analisis sementara dari DVR tergambar salah satu tersangka berinisial FEK berperan mengambil spanduk (banner). "Ada dua spanduk dan banner itu dibawa ke rumah tersangka FEK di daerah Tanah Abang dan akhirnya berhasil disita oleh tim penyidik," jelasnya.

Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan tersebut juga menyebutkan tim penyidik masih terus mengembangkan kasus ini. "Tentunya penyidikan kasus ini akan dilakukan transparan, akuntabel, profesional dan secara proporsional," katanya.

Terkait aksi tersebut, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menilai, aparat harus bertindak tegas terhadap kelompok preman yang diduga sebagai perusak dan pembubar paksa diskusi kelompok diaspora di Kemang. "Tindakan preman itu jelas tidak bisa dibiarkan. Kita minta harus ada tindakan tegas," kata Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan di Jakarta, Selasa (1/10).

Atas insiden yang terjadi di Kemang itu, Lemkapi minta siapa pun yang terlibat agar diproses secara hukum. "Karena sesuai undang undang, negara memberikan hak kepada setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat," kata pengajar di program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini.

Edi menyambut baik perintah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang dengan cepat merespons dan mengambil langkah-langkah hukum dengan memproses sejumlah pelaku yang ditangkap. "Kita melihat Polda Metro Jaya sudah melakukan langkah cepat dengan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku yang melakukan perusakan dan memproses hukum pelakunya," katanya.

Untuk menghindari insiden serupa, Edi menyarankan agar setiap pelaksanaan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang, baik itu kegiatan diskusi maupun silaturahmi supaya memberitahukan kepada kantor polisi setempat. Hal ini sangat penting agar polisi memberikan pengamanan dan mencegah terjadinya insiden serupa dan masyarakat bisa dengan nyaman menyampaikan aspirasinya. **(Ant/Has)-d**

PAKAR HUKUM UGM SOROTI PANSUS HAJI DPR

# Rekomendasi Dinilai Lampaui Kewenangan

**YOGYA (KR)** - Sidang Paripurna DPR ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Senayan Jakarta, menjadi saksi pergulatan rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji. Salah satu rekomendasi yang menonjol adalah usulan untuk pemerintah mendatang agar mengisi posisi Menteri Agama dengan figur yang lebih kompeten dalam mengelola ibadah haji.

Pendapat tersebut tidak lepas dari sorotan tajam pakar hukum dari Universitas Gajah Mada (UGM), Oce Madril, yang menegaskan, rekomendasi tersebut melampaui kewenangan DPR. Menurutnya, UUD 1945 menetapkan, pengisian jabatan menteri adalah hak prerogatif presiden dan tidak dapat diintervensi lembaga legislatif, termasuk Pansus.

"Rekomendasi Pansus ini *offside*, karena seharusnya hanya fokus pada perbaikan kebijakan dan regulasi penyelenggaraan haji, bukan mencampuri urusan penunjukan jabatan tertentu," ungkap Oce Madril dalam diskusi di Yogyakarta, Selasa (1/10).

Lebih lanjut, Oce Madril mengkritisi rekomendasi tersebut menunjukkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu untuk memengaruhi penunjukan Menteri Agama mendatang. Hal ini, menurutnya, merupakan langkah yang tidak tepat dalam konteks hak prerogatif yang melekat pada presiden.

"Kita harus memberi keleluasaan pada presiden mendatang untuk menentukan Menteri Agama tanpa adanya intervensi dari Pansus atau pihak lain," tambahnya.

Selain itu, dalam pandangannya, Pansus Haji seharusnya lebih memfokuskan perhatian pada perbaikan kebijakan dan tata kelola penyelenggaraan haji di masa mendatang. Misalnya, dengan melakukan review mendalam terhadap UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta memperkuat pengawasan di lapangan.

"Partisipasi aktif Tim DPR dalam pengawasan di lapangan juga perlu ditingkatkan untuk memastikan pelaksanaan haji berjalan lebih efektif," ujarnya.

Poin ketiga yang diangkat Oce Madril adalah relevansi putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017 yang membatasi ruang lingkup hak angket, yang seharusnya hanya berupa rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Hal ini memperkuat argumennya, Pansus Haji sebaiknya fokus pada upaya konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji bagi jemaah Indonesia.

**(Jon)-f**

KEMENLU RI IMBAU

# WNI di Lebanon Lakukan Evakuasi

**JAKARTA (KR)** - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dan Kedutaan Besar RI (KBRI) Beirut secara daring telah mengadakan pertemuan dengan para Warga Negara Indonesia (WNI) di Lebanon guna mendorong mereka untuk melakukan evakuasi.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI Judha Nugraha, Selasa (1/10) mengatakan, pertemuan itu berlangsung Senin (30/9) dan juga ditujukan untuk mengetahui situasi keamanan terakhir di Lebanon.

Ia mengungkapkan, ada beberapa WNI yang ingin tetap tinggal di Lebanon karena menganggap wilayah tempat mereka tinggal masih aman. Ada beberapa WNI yang baru melaporkan diri ke KBRI Beirut, sehingga jumlah WNI yang tercatat 159 orang, dari sebelumnya 155 orang. "Jumlah WNI di Lebanon 159 orang, tidak termasuk Staf KBRI dan personel TNI di UNIFIL," ujarnya, melalui pesan singkat.

Selain WNI yang tercatat tersebut, Indonesia memiliki sekitar 1.200 Prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

Sebelumnya, pada Kamis (26/9), Kemenlu RI menyatakan bahwa Pasukan TNI yang tergabung dalam UNIFIL siap membantu operasi evakuasi WNI yang berada di Lebanon.

Kemenlu menyatakan, jika evakuasi WNI berlangsung dengan bantuan Pasukan TNI di UNIFIL, proses tersebut akan dilaksanakan melalui koordinasi dengan Komandan Pasukan UNIFIL. Kemenlu juga telah mengeluarkan anjuran bagi WNI agar menunda perjalanan ke Lebanon dan Israel. KBRI Beirut telah menetapkan status Siaga 1 untuk WNI di seluruh wilayah Lebanon.Sejak penetapan Siaga 1 pada Agustus, KBRI Beirut telah memfasilitasi kepulangan 25 orang WNI dari Lebanon ke Indonesia.

Israel melakukan serangan udara ke Lebanon sejak 23 September. Hingga kini, menurut otoritas Lebanon, serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 960 orang dan melukai lebih dari 2.770 lainnya.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Hariyanto mengatakan, Prajurit TNI yang saat ini bertugas bersama Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) siap membantu mengevakuasi WNI di Lebanon pulang ke Tanah Air. TNI telah menyiapkan rencana kontingensi untuk situasi kedaruratan, termasuk di antaranya untuk evakuasi.

Namun, rencana itu perlu mendapatkan izin lebih dulu dari Pimpinan UNIFIL, yaitu Force Commander UNIFIL yang sejak 2022 dijabat Letjen Aroldo Azaro dari Angkatan Bersenjata Spanyol. **(Ant/San)-d**

SOPIR DAN AJUDAN MENINGGAL

# Mobil Kapolres Boyolali Kecelakaan di Tol

**SEMARANG (KR)** - Mobil yang ditumpangi Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga mengalami kecelakaan di KM 346 ruas tol Pemalang-Batang di Kabupaten Batang Jawa Tengah, Selasa (1/10). Akibat kecelakaan tersebut, sopir dan ajudan Kapolres Boyolali meninggal.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto membenarkan peristiwa nahas yang menewaskan sopir dan ajudan Kapolres Boyolali tersebut. Mobil yang ditumpangi Kapolres Boyolali tersebut menabrak bagian belakang sebuah truk tronton. "Mobil melaju dari arah timur ke barat, menabrak truk yang melaju di depannya," katanya.

Dua korban meninggal dunia masing-masing pengemudi dan ajudan, yang duduk di kursi bagian depan. Sementara Kapolres AKBP Muhammad Yoga selamat dalam kejadian tersebut yang selanjutnya dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari informasi yang diperoleh, lanjut Kombes Pol Artanto, Kapolres Boyolali dalam perjalanan ke Jakarta untuk menjenguk keluarganya yang sakit. Penyebab kecelakaan tersebut, masih dalam penyelidikan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah. "Untuk penyebabnya, masih dalam penyelidikan. Dua korban meninggal dunia di tempat kejadian," pungkasnya. **(Ant/Has)-f**

PERINGATI WORLD CLEAN UP DAY

# BRI Hadirkan Pelatihan Pengelolaan Sampah dan Mesin RVM untuk Lingkungan di Mandalika

BRI Peduli saat menggelar pelatihan pengelolaan sampah organik dan anorganik melalui Program Peduli Yok Kita GAS (Gerakan Anti Sampah), di Mandalika KR – Istimewa

**MANDALIKA (KR)** - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui Program BRI Peduli Yok Kita GAS (Gerakan Anti Sampah). Kali ini, perseroan menyelenggarakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan guna mendorong pengelolaan sampah terpadu dengan menerapkan prinsip sistematis, menyeluruh, berkesinambungan serta mengutamakan pemberdayaan.

Program ini diselenggarakan di tengah persiapan perhelatan Internasional Indonesian MotoGP di Mandalika, yang juga bertepatan dalam peringatan World Clean Up Day yang setiap tahunnya diperingati pada 20 September.

Program Yok Kita GAS pertama yang dijalankan adalah pelatihan pengelolaan sampah yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024 untuk 300 peserta, dimana nantinya peserta ini akan menjadi petugas pengelola sampah selama event MotoGP berlangsung pada 26-29 September 2024. Pelatihan ini berfokus pada mekanisme pemilahan dan pengelolaan sampah organik dan anorganik dengan berbagai metode inovatif.

Pelatihan juga memberi pengetahuan perihal pembuatan *ecoenzym* dan Pupuk Organik Cair (POC), hal ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan masyarakat tentang pemanfaatan sampah secara ekonomis. Pelatihan juga mengedepankan prinsip 9R (*Refuse, Reduce, Reuse, Repair, Recondition, Remanufacture, Repurpose, Recycle, dan Recover*) sebagai panduan dalam pengelolaan sampah.

Sebanyak 300 petugas yang dilatih tersebut, akan mengelola sampah di area Sirkuit Mandalika seluas 1200 Ha. Sampah akan ditimbang, dihitung, dan dikelola dengan baik sesuai dengan jenisnya. Kedepannya, Program Yok Kita GAS ini diharapkan menjadi penopang pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan dan juga menjadi alternatif pendapatan ekonomi masyarakat.

Wakil Direktur Utama Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa BRI berkomitmen membangun budaya keberlanjutan melalui program *Zero Waste to Landfill*, yang mencakup edukasi bagi pekerja tentang pengelolaan sampah dan pentingnya keberlanjutan lingkungan. "Sebagai bagian dari program ini, BRI juga memperkenalkan mesin *Reverse Vending Machine* (RVM) di Mandalika untuk mendaur ulang botol plastik. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja dan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik" ujarnya.

Melalui Program RVM Botol Plastik BRI Peduli – Tukar Botolmu Raih Poinmu, BRI memperkenalkan 2 (dua) mesin RVM di Mandalika untuk mendaur ulang botol plastik. Bagi masyarakat yang memasukkan botol Plastik ke mesin ini, akan mendapatkan poin, yang bisa ditukarkan menjadi saldo e-wallet.

"Kedua program ini adalah upaya BRI untuk memeriahkan *World Clean Up Day* yang merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung keberlanjutan dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Kami percaya bahwa inisiatif ini akan membantu masyarakat lokal dalam mengelola sampah dengan lebih efektif dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan", jelasnya. **(*)**

BRI gelar pelatihan mekanisme pemilahan dan pengelolaan sampah organik dan anorganik dengan berbagai metode inovatif di Mandalika. KR – Istimewa